

Factors That Influence the Quality of Local Government Financial Reports (Case Study on Jambi City Regional Apparatus Organizations)

Arief Isdayanto^{1*}, Enggar Diah Puspa Arum², Reni Yustien³, Fitrini Mansur⁴
Universitas Jambi

Corresponding Author: Arief Isdayanto ariefisdayanto8@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Human Resources Competency, Internal Control System, Utilization of Information Technology, Internal Audit, Implementation of Government Policy

Received : 5 January

Revised : 13 January

Accepted: 25 February

©2024 Isdayanto, Arum, Yustien, Mansur: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to test or analyze whether Human Resource Competency, Internal Control System, Use of Information Technology, Internal Audit, and Implementation of Government Policy influence the Quality of Jambi City Regional Government Financial Reports. The data used is primary data obtained through administering questionnaires to the Financial Administration Officials of Regional Apparatus Organizations (PPK-OPD) and the Finance Section of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in the Jambi City Regional Government. The sampling technique used the saturated sample method with a sample size of 48 respondents. The data analysis method uses descriptive analysis and Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least Square (PLS) analysis using Microsoft Excel and SmartPLS software. The research results show that Human Resource Competency, Internal Control Systems, and Implementation of Government Policies influence the Quality of Regional Government Financial Reports. Meanwhile, the use of Information Technology and Internal Audit has no effect on the Quality of Regional Government Financial Reports

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi)

Arief Isdayanto^{1*}, Enggar Diah Puspa Arum², Reni Yustien³, Fitrini Mansur⁴
Universitas Jambi

Corresponding Author: Arief Isdayanto ariefisdayanto8@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Audit Internal, Penerapan Kebijakan Pemerintah

Received : 5 January

Revised : 13 January

Accepted: 25 February

©2024 Isdayanto, Arum, Yustien, Mansur: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji atau menganalisis apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Audit Internal, dan Penerapan Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh melalui pemberian kuesioner pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Pemerintah Daerah Kota Jambi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 48 responden. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modelling (SEM) - Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sehingga harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. BPK memberikan penilaian berupa opini terkait LKPD yang disajikan, yang akan menunjukkan kualitas dari LKPD tersebut. LKPD Kota Jambi tahun anggaran 2020-2022 mendapat opini WTP, tetapi masih terdapat kelemahan yaitu pada 2020, lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pada 2021 terdapat 3 temuan, yaitu terkait pemanfaatan aset tetap, pembayaran belanja honorarium, dan kurangnya volume pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan, dan pada 2022 ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pembayaran honorarium yang tidak sesuai, kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan, serta adanya penghapusan aset. (jambi.bpk.go.id)

Fenomena diatas menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang terletak pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kelemahan tersebut tentunya akan berdampak pada nilai dari kualitas laporan keuangan yang telah disajikan. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan tugasnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. OPD memiliki faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas serta kewajibannya untuk mencapai tujuan dari OPD tersebut yakni laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001).

Sumber daya manusia adalah elemen utama dari suatu organisasi sehingga pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu berkontribusi secara optimal untuk mencapai suatu organisasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam rangka mengelola keuangan daerah dengan baik harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

SPIP adalah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008).

Sistem pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi, dimana proses tersebut dapat menjamin keamanan unsur-unsur yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Salah satu bagian dari sistem pengendalian internal adalah pengendalian internal akuntansi. Pengendalian internal akuntansi tersebut meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang terkoordinasi dalam menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. (Hamzah, 2009)

Dilihat dari sisi volume dan biaya, pemrosesan data yang dilakukan secara manual oleh tenaga kerja manusia secara langsung akan kurang efektif. Hal ini dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar sejumlah tenaga kerja yang diperlukan dan pemrosesan secara manual juga memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, pemrosesan data dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Meskipun biaya awal yang harus dikeluarkan lebih besar, seiring berjalannya waktu biaya tersebut dapat menutupi biaya-biaya yang mungkin akan dikeluarkan secara terus-menerus jika dilakukan secara manual.

Audit Internal

Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. (Mulyadi, 2010).

Peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu: jasa assurance dan jasa konsultasi. Jasa assurance merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan penugasan assurance ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen. (Yuliani, 2010).

Penerapan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP bertujuan sebagai acuan bagi: (a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya; (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi

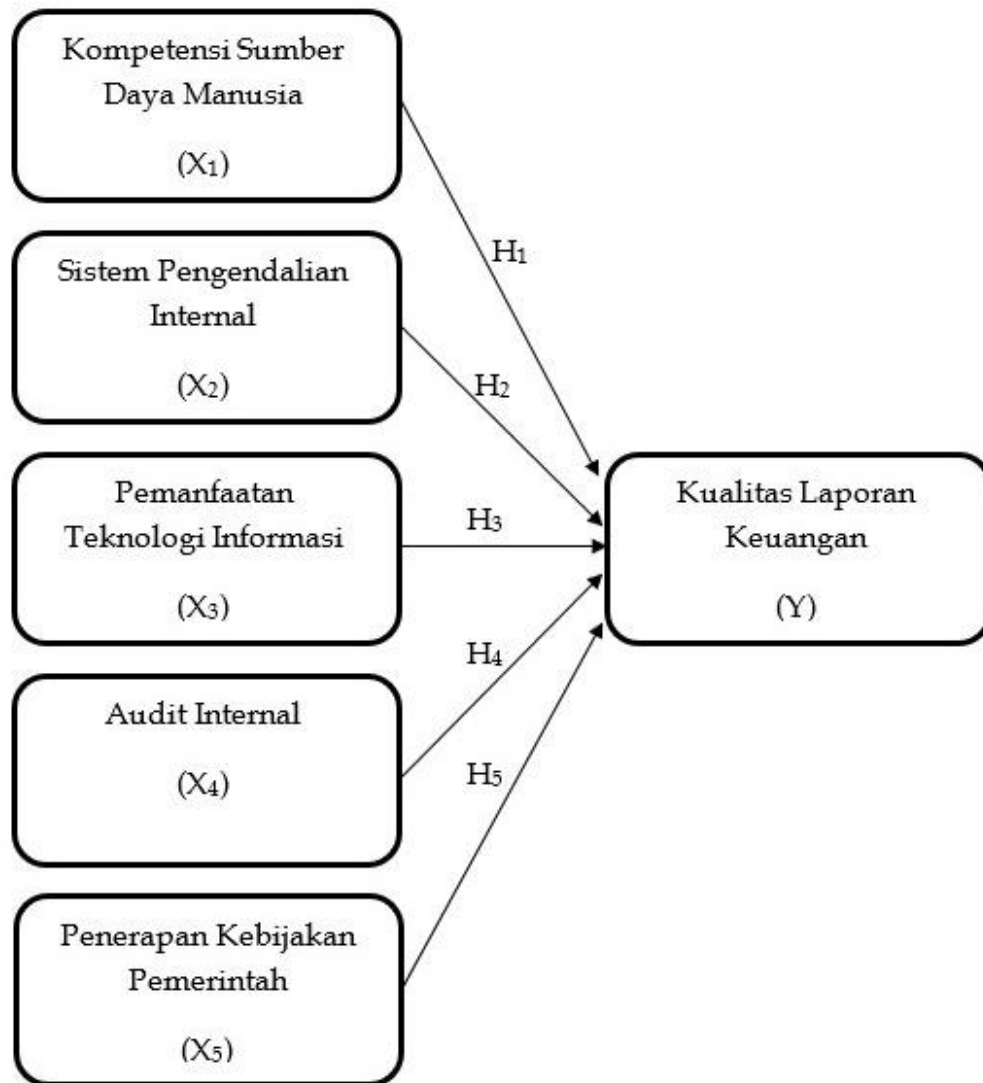
masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar; (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan catatan-catatan mengenai informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja dari suatu entitas tersebut. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Roviyantie, 2011).

Dalam mencapai tujuan penyajiannya, terdapat beberapa komponen yang harus tertera di dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H₄: Audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- H₅: Penerapan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

METODOLOGI

Objek pada penelitian ini adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, audit internal, dan penerapan kebijakan pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Lokasi penelitian ini yaitu Dinas-Dinas di Kota Jambi. Data yang digunakan adalah jenis data primer yang diperoleh melalui pemberian kuesioner kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Populasi pada penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) dan Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Pemerintah Daerah Kota Jambi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel Dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 48 responden. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modelling (SEM) - Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SmartPLS.

HASIL PENELITIAN

Data Umum Penelitian

Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 22 September 2023. Total kuesioner yang disebarkan yaitu 48 kuesioner dan semua kuesioner diterima kembali oleh peneliti serta dapat digunakan sebagai data penelitian.

Table 1. Karakteristik Responden

| Keterangan | Jumlah (Orang) | Persentase |
|----------------------------|----------------|------------|
| Jenis Kelamin: | | |
| 1. Laki-Laki | 14 | 29 % |
| 2. Perempuan | 34 | 71 % |
| Usia: | | |
| 1. 20 - 30 Tahun | 9 | 18 % |
| 2. 31 - 40 Tahun | 17 | 36 % |
| 3. 41 - 50 Tahun | 16 | 33 % |
| 4. > 50 Tahun | 6 | 12 % |
| Tingkat Pendidikan: | | |
| 1. SMA / SMK | - | - |
| 2. Diploma | 2 | 4 % |
| 3. S1 | 36 | 76 % |
| 4. S2 | 10 | 20 % |
| 5. S3 | - | - |
| Latar Belakang Pendidikan: | | |
| 1. Akuntansi | 17 | 35 % |
| 2. Manajemen | 3 | 7 % |
| 3. Ilmu Ekonomi | 10 | 21 % |
| 4. Hukum | 3 | 7 % |
| 5. Teknik | 1 | 2 % |
| 6. Lain-Lain | 13 | 28 % |

| | | |
|--------------------|----|------|
| Pengalaman Kerja : | | |
| 1. 0 – 5 Tahun | 15 | 31 % |
| 2. 6 – 10 Tahun | 5 | 11 % |
| 3. 11 – 15 Tahun | 9 | 19 % |
| 4. 16 – 20 Tahun | 9 | 19 % |
| 5. > 20 Tahun | 9 | 19 % |

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Analisis Statistik Deskriptif

Table 2. Analisis Statistik Deskriptif

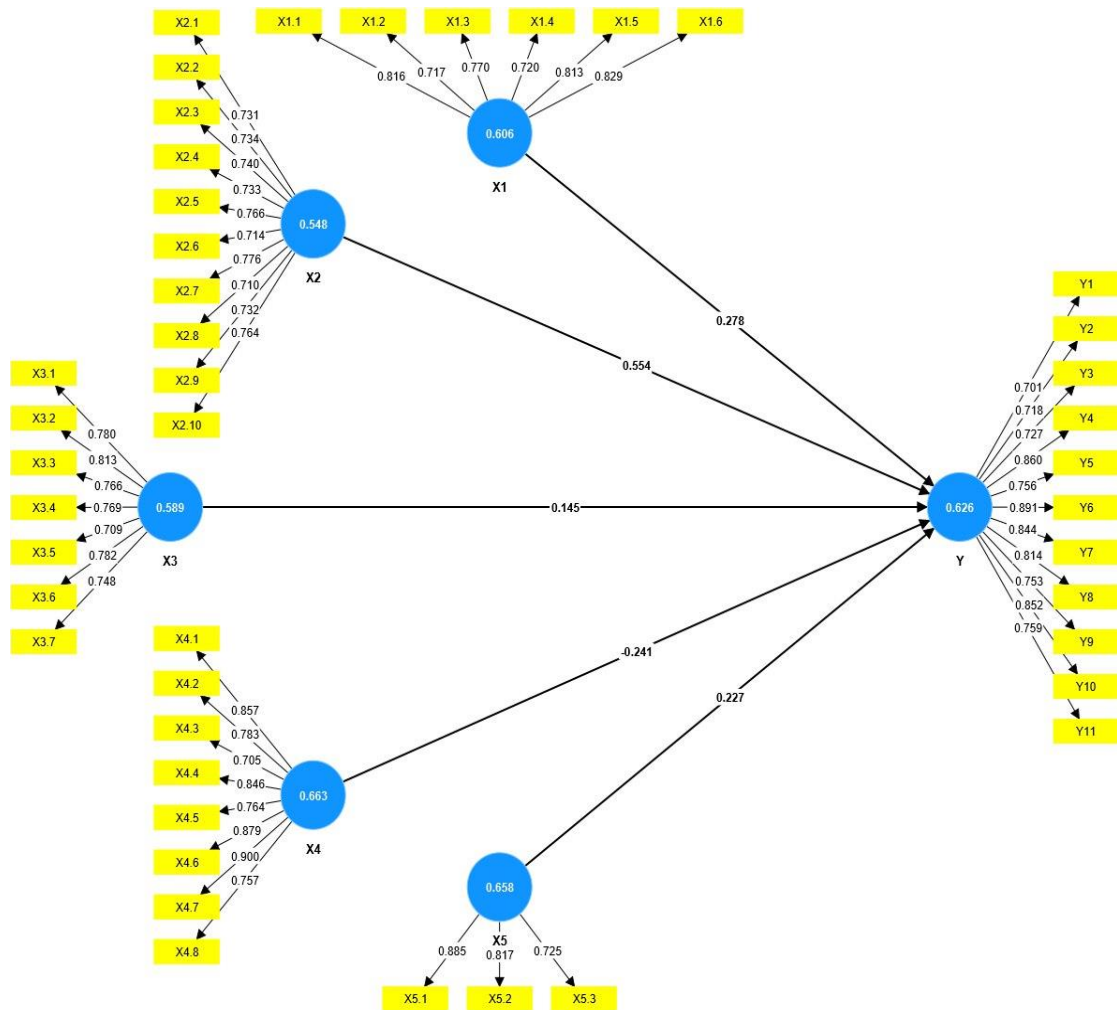
| Indikator | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std. Deviation |
|------------------|----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| KSDM | 48 | 1 | 5 | 3,962 | 0,704 |
| SPI | 48 | 3 | 5 | 4,296 | 0,528 |
| PTI | 48 | 1 | 5 | 4,149 | 0,765 |
| AI | 48 | 3 | 5 | 4,211 | 0,545 |
| PKP | 48 | 3 | 5 | 4,340 | 0,555 |
| KLKPD | 48 | 3 | 5 | 4,347 | 0,518 |

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

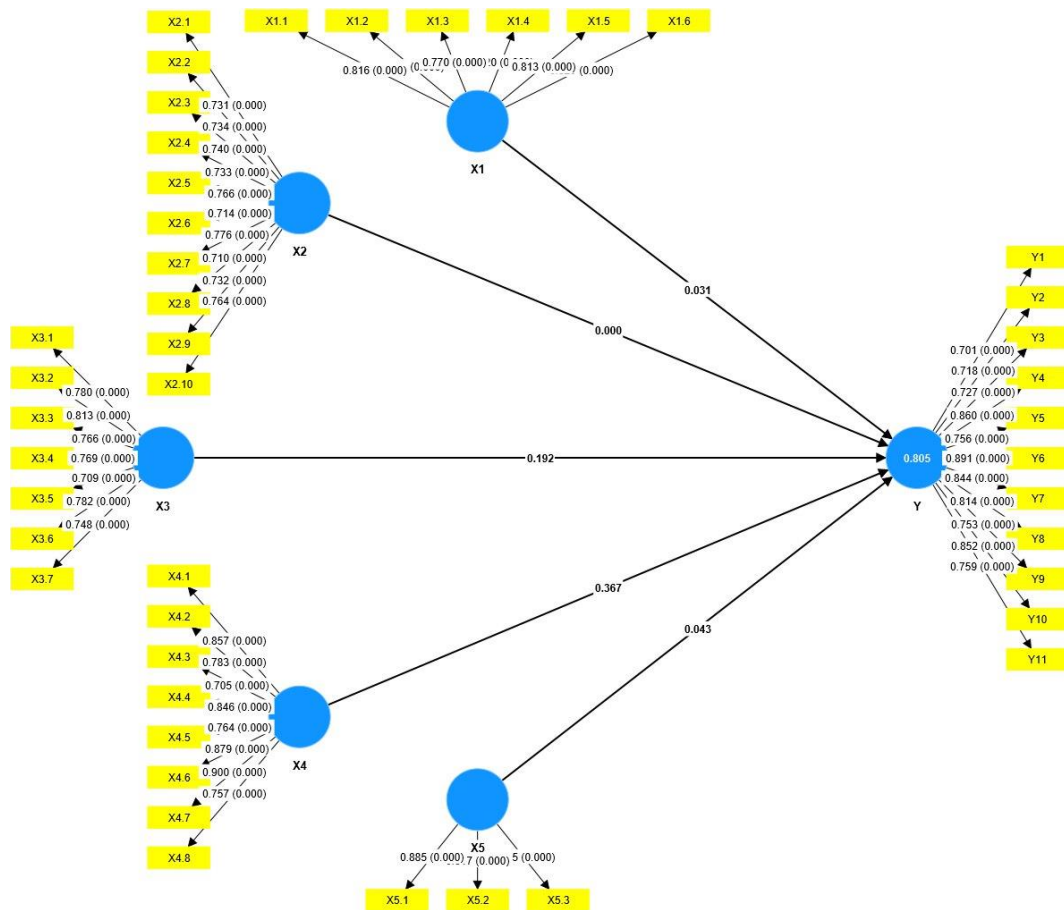
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) berjumlah 48 data. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) mempunyai nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 3,962 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,704. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) mempunyai nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,296 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,528. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) mempunyai nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,149 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,765. Variabel Audit Internal (X4) mempunyai nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,211 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,545. Variabel Penerapan Kebijakan Pemerintah (X5) mempunyai nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,340 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,555. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) mempunyai nilai minimum 3 dan nilai maksimum 5, nilai rata-rata 4,347 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,518.

Evaluasi Model Penelitian

Evaluasi model dilakukan menggunakan bantuan software SmartPLS 4 dengan 2 tahap, yaitu PLS-SEM Algorithm dan Bootstrapping sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian PLS SEM Algorithm
Sumber: Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023



Gambar 3. Model Penelitian Bootstrapping

Sumber: Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa indikator pada setiap variable mampu menghasilkan nilai loading factor $> 0,7$; sehingga dapat dikatakan ideal (valid) atau memenuhi kriteria convergent validity dan indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel yang dibentuknya.

Berdasarkan gambar 2 di atas juga dapat dilihat bahwa setiap variabel laten menghasilkan nilai AVE $> 0,5$; sehingga dapat dikatakan valid dan mampu menjelaskan lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata.

Discriminant Validity

Tabel 3. Nilai Cross Loading

| | KSDM | SPI | PTI | AI | PKP | KLKPD | Status |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| X1.1 | 0,816 | 0,544 | 0,509 | 0,575 | 0,513 | 0,563 | Valid |
| X1.2 | 0,717 | 0,482 | 0,408 | 0,559 | 0,465 | 0,443 | Valid |
| X1.3 | 0,770 | 0,448 | 0,425 | 0,478 | 0,489 | 0,520 | Valid |
| X1.4 | 0,720 | 0,340 | 0,521 | 0,494 | 0,384 | 0,419 | Valid |
| X1.5 | 0,813 | 0,536 | 0,289 | 0,593 | 0,440 | 0,547 | Valid |
| X1.6 | 0,829 | 0,623 | 0,474 | 0,656 | 0,452 | 0,628 | Valid |
| X2.1 | 0,506 | 0,731 | 0,390 | 0,491 | 0,631 | 0,617 | Valid |
| X2.2 | 0,508 | 0,734 | 0,539 | 0,543 | 0,567 | 0,563 | Valid |
| X2.3 | 0,450 | 0,740 | 0,514 | 0,465 | 0,670 | 0,652 | Valid |
| X2.4 | 0,517 | 0,733 | 0,512 | 0,466 | 0,543 | 0,633 | Valid |
| X2.5 | 0,286 | 0,766 | 0,514 | 0,445 | 0,651 | 0,593 | Valid |
| X2.6 | 0,462 | 0,714 | 0,518 | 0,546 | 0,619 | 0,671 | Valid |
| X2.7 | 0,624 | 0,776 | 0,603 | 0,599 | 0,647 | 0,728 | Valid |
| X2.8 | 0,425 | 0,710 | 0,703 | 0,633 | 0,496 | 0,562 | Valid |
| X2.9 | 0,416 | 0,732 | 0,669 | 0,578 | 0,598 | 0,588 | Valid |
| X2.10 | 0,553 | 0,764 | 0,491 | 0,605 | 0,589 | 0,650 | Valid |
| X3.1 | 0,361 | 0,518 | 0,780 | 0,530 | 0,422 | 0,454 | Valid |
| X3.2 | 0,374 | 0,573 | 0,813 | 0,423 | 0,483 | 0,523 | Valid |
| X3.3 | 0,390 | 0,626 | 0,766 | 0,444 | 0,482 | 0,591 | Valid |
| X3.4 | 0,332 | 0,537 | 0,769 | 0,431 | 0,554 | 0,514 | Valid |
| X3.5 | 0,477 | 0,562 | 0,709 | 0,454 | 0,620 | 0,638 | Valid |
| X3.6 | 0,512 | 0,542 | 0,782 | 0,502 | 0,477 | 0,508 | Valid |
| X3.7 | 0,522 | 0,555 | 0,748 | 0,532 | 0,509 | 0,531 | Valid |
| X4.1 | 0,681 | 0,560 | 0,564 | 0,857 | 0,461 | 0,467 | Valid |
| X4.2 | 0,711 | 0,521 | 0,574 | 0,783 | 0,383 | 0,409 | Valid |
| X4.3 | 0,474 | 0,505 | 0,456 | 0,705 | 0,574 | 0,397 | Valid |
| X4.4 | 0,609 | 0,579 | 0,443 | 0,846 | 0,420 | 0,462 | Valid |
| X4.5 | 0,525 | 0,476 | 0,274 | 0,764 | 0,329 | 0,393 | Valid |
| X4.6 | 0,622 | 0,646 | 0,433 | 0,879 | 0,430 | 0,557 | Valid |
| X4.7 | 0,604 | 0,700 | 0,678 | 0,900 | 0,488 | 0,550 | Valid |
| X4.8 | 0,480 | 0,688 | 0,559 | 0,757 | 0,588 | 0,491 | Valid |
| X5.1 | 0,485 | 0,654 | 0,617 | 0,561 | 0,885 | 0,688 | Valid |
| X5.2 | 0,462 | 0,649 | 0,594 | 0,474 | 0,817 | 0,600 | Valid |
| X5.3 | 0,478 | 0,674 | 0,414 | 0,332 | 0,725 | 0,655 | Valid |
| Y.1 | 0,483 | 0,564 | 0,394 | 0,407 | 0,656 | 0,701 | Valid |
| Y.2 | 0,476 | 0,526 | 0,548 | 0,465 | 0,597 | 0,718 | Valid |
| Y.3 | 0,527 | 0,677 | 0,563 | 0,363 | 0,601 | 0,727 | Valid |
| Y.4 | 0,533 | 0,737 | 0,582 | 0,479 | 0,800 | 0,860 | Valid |
| Y.5 | 0,555 | 0,627 | 0,444 | 0,387 | 0,647 | 0,756 | Valid |
| Y.6 | 0,643 | 0,743 | 0,612 | 0,506 | 0,735 | 0,891 | Valid |
| Y.7 | 0,549 | 0,711 | 0,584 | 0,518 | 0,626 | 0,844 | Valid |
| Y.8 | 0,451 | 0,768 | 0,514 | 0,372 | 0,616 | 0,814 | Valid |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Y.9 | 0,413 | 0,598 | 0,430 | 0,384 | 0,437 | 0,753 | Valid |
| Y.10 | 0,625 | 0,690 | 0,723 | 0,535 | 0,611 | 0,852 | Valid |
| Y.11 | 0,595 | 0,701 | 0,733 | 0,605 | 0,612 | 0,759 | Valid |

Sumber: Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa indikator dari suatu variabel menghasilkan nilai cross loading yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi pada blok lainnya, yang berarti bahwa variabel tersebut mampu memprediksi ukuran pada blok mereka dengan lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sehingga berdasarkan nilai cross loadingnya, dapat dikatakan bahwa indikator pada setiap variabel memiliki discriminant validity yang baik.

Tabel 4. Nilai Berdasarkan Pendekatan Fornell-Lacker

| | KSDM | SPI | PTI | AI | PKP | KLKPD |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| KSDM | 0.779 | 0.646 | 0.557 | 0.721 | 0.587 | 0.676 |
| SPI | 0.646 | 0.740 | 0.734 | 0.726 | 0.814 | 0.850 |
| PTI | 0.557 | 0.734 | 0.767 | 0.617 | 0.668 | 0.710 |
| AI | 0.721 | 0.726 | 0.617 | 0.814 | 0.564 | 0.579 |
| PKP | 0.587 | 0.814 | 0.668 | 0.564 | 0.811 | 0.802 |
| KLKPD | 0.676 | 0.850 | 0.710 | 0.579 | 0.802 | 0.791 |

Sumber: Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan nilai akar AVE dari setiap variabel, dimana harus lebih tinggi dari korelasi antara variabel dengan variabel lainnya. Hasil pengujian dengan pendekatan fornell-lacker ini belum sepenuhnya baik karena tidak semua variabel memiliki nilai akar AVE yang lebih tinggi dari korelasi antar variabel lainnya, yaitu pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X2), Penerapan Kebijakan Pemerintah (X5), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Composite Reability

Tabel 5. Nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability

| Variabel | Cronbach Alpha | Composite Reliability | Status |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| KSDM | 0,871 | 0,902 | Reliabel |
| SPI | 0,908 | 0,924 | Reliabel |
| PTI | 0,884 | 0,909 | Reliabel |
| AI | 0,926 | 0,940 | Reliabel |
| PKP | 0,736 | 0,852 | Reliabel |
| KLKPD | 0,939 | 0,948 | Reliabel |

Sumber: Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai cronbach alpha dan composite reliability masing-masing > 0,7. Sehingga dari kedua kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator pada setiap variabelnya telah reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tabel 6. Nilai R², Q², dan F²

| Variabel | R-square | Q-square | F-square |
|----------|----------|----------|----------|
| KSDM | | | 0,170 |
| SPI | | | 0,334 |
| PTI | | | 0,046 |
| AI | | | 0,104 |
| PKP | | | 0,082 |
| KLKPD | 0,805 | 0,680 | |

Sumber : Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023

Tabel 7. Goodness of Fit Model

| Model fit and quality indices | |
|--------------------------------|---------|
| Average Path Coefficient (APC) | = 0,193 |
| Average R-squared (ARS) | = 0,805 |
| Average block VIF (AVIF) | = 4,082 |

Sumber : Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023

Koefisien Determinan / R² (R-square)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai R² = 0,805, yang artinya variabel independen mempunyai pengaruh sebesar 80,5% terhadap variabel dependen yang diteliti. Sedangkan sisanya yaitu 19,5% merupakan faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Pengaruh tersebut termasuk ke dalam kategori pengaruh kuat (R² > 0,67).

Relevansi Prediksi / Q² (Q-square)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Q² = 0,680, yang artinya estimasi model pada penelitian ini memiliki kapabilitas prediksi yang besar (Q² > 0,35).

Ukuran Efek / F² (F-square)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) dan Sistem Pengendalian Internal (X₂) memiliki nilai F² masing-masing 0,170 dan 0,334, di mana kebaikan model pada variabel tersebut termasuk ke dalam kategori sedang (0,15 < F² < 0,35) yang berarti memiliki pengaruh sedang terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sedangkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃), Audit Internal (X₄), dan Penerapan Kebijakan Pemerintah (X₅) memiliki nilai F² masing-masing 0,046; 0,104; dan 0,082, di mana kebaikan model pada variabel tersebut termasuk ke dalam kategori kecil (0,02 < F² < 0,15) yang berarti memiliki pengaruh kecil terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Uji Kecocokan Model (Goodness of Fit Model)

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai APC = 0,193 dan ARS = 0,805. Sehingga diperoleh nilai GoF Index = 0,394 di mana model yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori tinggi. Tabel tersebut juga menunjukkan nilai AVIF = 4,082 di mana telah memenuhi kriteria yaitu harus bernilai < 5. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inner model dapat diterima.

Pengujian Hipotesis

Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis. Sehingga apabila nilai p-value $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan apabila nilai p-value $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 8. Nilai Path Coefficient dan Nilai p-value

| Variabel | Path Coefficient | Status | p-value | Status |
|-------------|------------------|---------|---------|------------------|
| KSDM | 0,278 | Positif | 0,031 | Signifikan |
| SPI | 0,554 | Positif | 0,000 | Signifikan |
| PTI | 0,145 | Positif | 0,192 | Tidak Signifikan |
| AI | -0,241 | Negatif | 0,367 | Tidak Signifikan |
| PKP | 0,227 | Positif | 0,043 | Signifikan |

Sumber : Output SmartPLS 4 Berdasarkan Data Penelitian 2023

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_1 diterima). Kompetensi sumber daya manusia dapat diukur dari tiga komponen utama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi dalam menyusun laporan keuangan akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan dan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pada penelitian ini indikator yang paling dominan dalam mewakili variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sikap

Sikap seseorang dalam menjalankan praktik kerja sesuai dengan etika dan kode etik yang berlaku sangat penting untuk dimiliki setiap individu. Hal ini yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu pekerjaan. Begitu pula dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, di mana semakin tinggi nilai dari sikap setiap aparatu pemerintah akan meningkatkan nilai dari kompetensi sumber daya manusia itu sendiri, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_2 diterima). Sistem pengendalian internal ini meliputi

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima indikator tersebut membentuk suatu sistem pengendalian internal yang baik, yang dapat diterapkan untuk memperoleh laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Pada penelitian ini indikator yang paling dominan dalam mewakili variabel sistem pengendalian internal adalah pemantauan.

Pemantauan berhubungan dengan penilaian atas sistem pengendalian internal yang telah dijalankan. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi kelemahan yang ada agar dapat cepat diatasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. Sehingga dengan adanya peningkatana efektivitas dari sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_3 ditolak). Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki tiga indikator yaitu perangkat, pengelolaan data keuangan, dan perawatan. Ketiga indikator tersebut mewakili variabel pemanfaatan teknologi informasi yang sangat membantuk dalam proses penyiapan data, penyusunan data, serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Pada penelitian ini indikator yang paling dominan dalam mewakili variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah perangkat.

Penyediaan perangkat teknologi tentunya merupakan hal utama dalam pemanfaatan penggunaannya. Secara persepsi, pemanfaatan teknologi informasi yang telah disediakan pada setiap OPD apabila telah dimanfaatkan dengan baik akan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi sejatinya sapat membantu proses pengumpulan data, pengelolaan data, serta penyajian data laporan keuangan. Selain itu dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat akan dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemajuan teknologi yang pesat dan semakin luas akan pemanfaatannya dapat membuat berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, serta menggunakan informasi keuangan pemerintah daerah secara cepat dan akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang seakin baik dalam proses penyusunan laporan keuangan

akan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan pada OPD Kota Jambi belum dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga pada penerapannya tidak dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang telah diterapkan tidak dapat menunjang atau mendukung dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, contohnya seperti pengadaan perangkat teknologi yang belum merata pada setiap bagian, penyediaan koneksi internet sebagai pendukung dalam menjalankan perangkat tersebut, atau bisa juga disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak cukup ahli dalam pengoperasiannya. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena apabila penyediaan perangkat telah dilakukan secara merata tetapi tidak ditunjang dengan kemampuan seseorang dalam menjalankannya maka manfaat yang diperoleh tidak akan maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, dkk (2016) yang berkesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tingginehe, dkk (2021) dengan hasil penelitiannya yaitu penggunaan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_4 ditolak). Peran audit internal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki empat indikator yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Keempat indikator tersebut berperan dalam menilai kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi pemeriksaan akuntansi, keuangan dan tanggung jawab manajemen serta memberikan evaluasi atas proses penyusunan laporan keuangan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini indikator yang paling dominan dalam mewakili variabel audit internal adalah kompetensi.

Kompetensi dalam audit internal merupakan pengetahuan, kemampuan atau keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana peran dari audit internal itu sendiri. Kompetensi yang dimiliki seorang auditor internal akan sangat mempengaruhi peran yang mereka lakukan dalam proses penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Audit internal dapat disebut juga sebagai pengawas intern organisasi perangkat daerah. Selaku pengawas intern pemerintah, audit internal berperan dalam mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah, dimulai dari proses pengumpulan data, pengelolaan data, hingga penyusunan laporan keuangan. Audit internal akan menilai kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparatur pemerintah dalam menjalankan kewajibannya, serta memberikan evaluasi

terhadap kekurangan yang ada. Sehingga peran audit internal akan dapat membantu dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan andal.

Akan tetapi pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal tidak sejalan sebagaimana mestinya, di mana audit internal pada OPD Kota Jambi belum cukup berperan dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan oleh audit internal tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena peran dari audit internal pada OPD Kota Jambi yang belum maksimal menjalankan tugasnya dalam mengawasi, memeriksa serta memberikan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atika, dkk (2019) yang berkesimpulan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2020), dengan hasil penelitiannya yaitu peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa penerapan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H_5 diterima). Kebijakan pemerintah ini mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP menjelaskan penggunaan basis akuntansi akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas, serta basis akuntansi kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. SAP juga mengatur penyajian LKPD secara wajar. Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Agustini (2016), dimana kebijakan pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terkait faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator yang paling dominan mewakili variabel ini adalah sikap, sehingga semakin tinggi nilai sikap dari aparatur pemerintah maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator yang paling dominan mewakili variabel ini adalah pemantauan, sehingga semakin tinggi aspek pemantauan dalam organisasi perangkat daerah maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator yang paling dominan mewakili variabel ini adalah perangkat. Teknologi yang semakin berkembang apabila dalam pemanfaatannya tidak dilakukan dengan baik maka tidak dapat menunjang atau mendukung dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
OPD Kota Jambi diharapkan dapat meningkatkan pengadaan perangkat teknologi, menyediakan koneksi internet yang cukup, serta memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah untuk dapat mengoperasikan teknologi yang semakin berkembang.
4. Audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator yang paling dominan mewakili variabel ini adalah kompetensi. Audit internal pada organisasi pemerintah daerah yang belum maksimal sehingga perannya tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
OPD Kota Jambi diharapkan dapat meningkatkan peran dari audit internal agar semakin maksimal menjalankan kewajibannya dalam mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Penerapan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah ini mengacu pada SAP, di mana mengatur prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sehingga semakin baik penerapan SAP dalam penyusunannya maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin meningkat.

PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas ruang lingkup atau objek penelitian, sehingga lebih banyak pula sampel yang diteliti. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih mendalam seperti melakukan wawancara kepada narasumber selaku sampel penelitian, sehingga data yang diperoleh semakin kuat dan valid. Selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan atau menambah variabel yang lebih bervariasi seperti sistem akuntansi yang digunakan dan tingkat transparansi serta pengungkapan penuh dalam penyusunan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah & Jogiyanto. 2011. *Partial Least Square (PLS), Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Atika, D., Junaidi, L. D., & Irmadhani, A. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuagnan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal warta*, 62, 77-90.
- Handayani, P. N., dkk. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber daya Manusia, Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 270-279.
- jambi.bpk.go.id. Kota Jambi Raih Opini WTP. Diakses pada 25 November 2021, dari <https://jambi.bpk.go.id/kota-jambi-raih-opini-wtp/>
- jambi.bpk.go.id. LHP LKPD. Diakses pada 12 Juli 2023, dari <https://jambi.bpk.go.id/lhp-lkpd/>
- jambi.bpk.go.id. LKPD Kota Jambi. Diakses pada 18 November 2022, dari <https://jambi.bpk.go.id/lhp-lkpd/lkpd-kota-jambi/>
- jambi.bpk.go.id. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi Meraih Opini WTP. Diakses pada 12 Juli 2023, dari <https://jambi.bpk.go.id/pemerintah-kabupaten-tanjung-jabung-barat-dan-kota-jambi-meraih-opini-wtp/>
- jambi.bpk.go.id. Penyerahan LHP atas LKPD TA 2021 kepada Empat Pemerintah Daerah. Diakses pada 25 Oktober 2022, dari <https://jambi.bpk.go.id/penyerahan-lhp-atas-lkpd-ta-2021-kepada-empat-pemerintah-daerah/>

- Mulia, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 7-21.
- Mulyadi. 2010. *Auditing*, Buku 1 edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. (2008). Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. (2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- Tingginehe, S. M., Andreas, H. H., & Marwata, M. (2021). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64.